



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKARNAIN MISTORTOIFY
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI SENI PROGRAM DOKTOR
3. NHK : 445555

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah Seluas 156 m ² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	124.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOBIL, CHEVROLET SPINN SPIN.1.3 LTZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
4. MOTOR, AEROX TYPE S AEROX TYPE S Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	155.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	106.633.904
F. HARTA LAINNYA	Rp.	25.000.000
Sub Total	Rp.	910.633.904
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	910.633.904

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.